

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam struktur pemerintahan, dinas memiliki peran yang besar dalam membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Masing masing dinas tersebut juga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki dinas tersebut. Oleh karena itu penting bagi suatu pemerintahan melakukan evaluasi untuk kemajuannya kedepan agar dapat menjadi tolak ukur. Adapun hal yang diperlukan untuk melakukan evaluasi tersebut yaitu, peninjauan kinerja. Studi tentang kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dilakukan karena untuk mengetahui hasil kerja yang dicapai oleh suatu dinas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu instansi dalam hal ini yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemerintah khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menanggulangi permasalahan masyarakat di Indonesia. Terutama di lingkungan masyarakat perkotaan yang semakin lama semakin padat karena adanya arus urbanisasi. Masyarakat-masyarakat pedesaan terutama yang masih berada didaerah pedalaman banyak yang masih beranggapan bahwa kerja di kota akan membawa pada kesuksesan, namun hal tersebut tidaklah selamanya benar. Melainkan akan membawa

permasalahan bagi mereka sendiri terlebih bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Hal ini dapat memicu timbulnya kesenjangan sosial dan menambah pengangguran di perkotaan. Menjamurnya fenomena-fenomena seperti ini membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk mengelola tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tidak berdampak pada perekonomian negara.

Selain berdampak pada perekonomian, masalah ini juga berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Di mana banyak anak terlahir dari keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dari segi materi maupun segi lainnya seperti pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok sosial yang meresahkan masyarakat seperti contohnya tuna sosial yang termasuk didalamnya pengemis, anak jalanan, gelandangan, wanita tuna susila, waria, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).<sup>1</sup> Masalah-masalah tersebut merupakan masalah yang sangat mendasar dan dapat membawa masyarakat semakin terpuruk kedalam kemiskinan, sehingga menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial yang lebih jauh.

Dari keseluruhan kasus mengenai tuna sosial, anak jalanan merupakan salah satu fenomena yang sangat umum dialami disetiap kota di Indonesia. Hal ini membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah sendiri. Keberadaan anak jalanan tidak lagi hanya berada di kota besar utama seperti Jakarta, tetapi sudah menyebar ke berbagai kota lainnya seperti Semarang, Bandung, dan juga Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri merupakan salah satu kota besar di

---

<sup>1</sup><http://www.dinsos.baliprov.go.id/id/Tugas-Pokok-dan-Fungsi2> (Diakses, 3 Oktober 2015)

Indonesia ternyata memiliki permasalahan yang serius tentang tuna sosial dalam hal ini adalah anak jalanan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah ini. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Fakir miskin di sini merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, fakir miskin dapat juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai sumber mata pencarian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai standar kehidupan. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara<sup>2</sup>. Negara mempunyai kewajiban tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya.

Berdasarkan data survei dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta jumlah anak jalanan dari tahun 2010-2014 di kota Yogyakarta antara lain, pada tahun 2010 hingga 2011, angka anak jalanan berada di jumlah 142 dan 85 orang, terjadi penurunan dari tahun 2010 ke 2011. Sedangkan di tahun-tahun selanjutnya yaitu 2012, jumlah anak jalanan terjadi peningkatan sangat drastis dari yang sebelumnya berjumlah 85 orang menjadi 214. Pada tahun 2013 jumlah anak jalanan terjadi penurunan yang sangat drastis dari 214 orang menjadi 58 orang dan semakin membaik pada tahun 2014 yaitu sebanyak 54 orang. Hal ini menunjukkan bahwa program anak jalanan yang dijalankan oleh

---

<sup>2</sup>[http://www.academia.edu/8064323/KESEJAHTERAAN\\_SOSIAL\\_Hak\\_Masyarakat\\_and\\_Kewajiban](http://www.academia.edu/8064323/KESEJAHTERAAN_SOSIAL_Hak_Masyarakat_and_Kewajiban) (Diakses, 3 Oktober 2015)

Dinas Sosial pada tahun-tahun tersebut semakin lama semakin membaik. Akan tetapi di tahun 2012 jumlah anak jalanan mengalami kenaikan. Selanjutnya dari tahun 2012, 2013, 2014 kinerja Dinas Sosial terbilang baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab anak memilih untuk hidup di jalanan dibandingkan tinggal bersama keluarga antara lain yaitu ketidakharmonisan dengan keluarga seperti perceraian, percekocokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, baik itu dikarenakan orang tuanya meninggal dunia maupun mereka yang tidak menjalankan fungsinya. Selain itu kekerasan fisik atau emosional yang dilakukan orang tua juga dapat menjadi salah satu pemicu anak untuk meninggalkan rumah dan turun ke jalanan. Faktor ekonomi keluarga juga dapat memaksa setiap anggota keluarga untuk tetap bertahan hidup dengan cara bergabung atau bahkan menjerumuskan diri untuk hidup di jalanan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dalam Bab I Pasal I tentang anak yang hidup di jalan dijelaskan bahwa “Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (Delapan Belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-jalanan-faktor-yang.html>

<sup>4</sup> [http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/02/Perda\\_Nomor\\_6\\_Tahun\\_2011\\_tentang\\_Perlindungan\\_Anak\\_Yang\\_Hidup\\_di\\_Jalan.pdf](http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/02/Perda_Nomor_6_Tahun_2011_tentang_Perlindungan_Anak_Yang_Hidup_di_Jalan.pdf) (Diakses, 7 oktober 2015)

Kota Yogyakarta telah lama dikenal sebagai kota budaya, kota pendidikan dan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Salah satu daya tarik bagi wisatawan asing maupun wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Yogyakarta adalah kawasan Malioboro, yang dikenal sebagai “*Shopping Street*“ bagi para wisatawan. Kegiatan spesifik yang ada di sepanjang jalan Malioboro, meliputi: penjualan souvenir atau cenderamata, baju batik, manik-manik, hiasan, kerajinan kulit, logam, wayang golek dan kulit. Selain itu di sepanjang jalan Malioboro dikenal dengan penjualan makanan lesehan dan kereta dorong, para pengamen jalanan, penyemir sepatu dan kegiatan sektor Informal lainnya. Bagian sisi lain dari gemerlapan kawasan Malioboro di Yogyakarta adalah keberadaan anak jalanan, para pengamen jalanan, tukang semir sepatu dan anak-anak menjadi pengemis di perempatan lampu merah. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berpenampilan kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi dan melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan.<sup>5</sup> Anak jalanan memiliki perilaku yang bisa dikatakan sebagai cerminan dari kehidupan yang sudah mereka lalui. Di antara sikapnya yang menonjol adalah ketidakramahan dan perilaku mereka yang kasar. Hal ini bisa dikatakan merupakan akibat dari ketidakadilan dalam bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masa pertumbuhan mereka baik secara fisik maupun mental. Fenomena ini menyerupai sebuah lingkaran yang tidak pernah putus, di mana para anak jalanan tersebut akan terus terjebak di dalamnya tanpa bisa mencari jalan keluar.

---

<sup>5</sup><http://dokumen.tips/documents/artikel-anak-jalanan.html> (Diakses,9 oktober 2015)

Berdasarkan data yang ada dan telah diuraikan di atas bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum sepenuhnya bisa menangani permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta. Sehingga anak jalanan harus dapat perhatian lebih dalam penanganan untuk ditertibkan, sehingga tidak meresahkan masyarakat banyak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam melakukan penertiban anak jalanan tahun 2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan uraian dan rumusan pokok permasalahan yang diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi pemerintahan dan perumusan kebijakan sebagai bahan perkembangan dalam hal kinerja mengenai penangan anak jalanan.
- b. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai cara penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintahan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian dari Ami Prihandara (2012) tentang “Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan kota Serang Tahun 2012” yang mengambil lokasi di Kota Serang. Di mana Dinas Sosial Kota Serang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Salah satunya permasalahan tentang anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial melakukan pembinaan yang diharapkan mengurangi jumlah anak jalanan dan dapat memperbaiki kehidupan anak jalanan menjadi lebih baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial kota Serang Tentang Pembinaan Anak Jalanan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 30 orang anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Serang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi dan kuesioner.

Ami Prihandara mengungkapkan penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di kota Serang masih belum baik karena hasil perhitungan diperoleh  $t$ -hitung lebih kecil  $t$ -tabel =  $0,15 < 1,699$  dan Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Serang hanya mencapai 69% dari angka minimal 70%.

Dari penelitian ini buruknya Kinerja Dinas Sosial Kota Serang dalam Pembinaan Anak Jalanan Tahun 2012 adalah diperlukan upaya terutama untuk meningkat Kinerja Dinas dalam membina anak jalanan yaitu dengan menyediakan tempat yang strategis untuk anak jalanan agar dapat mengaplikasikan ilmu setelah

pembinaan yang cukup untuk pelatihan sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian Dinas Sosial disarankan untuk membuat program baru yang lebih beragam, mensosialisasikan program yang ada sehingga Kota Serang dapat terbebas dari anak jalanan.

Penelitian dari Khaerul Sonni (2010) tentang “Kinerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tegal Rejo Kota Yogyakarta Tahun 2010” yang mengambil lokasi di Kecamatan Tegal Rejo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan salah satu program yang didesain oleh pemerintah untuk memerangi dan menanggulangi kemiskinan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tegal Rejo Kota Yogyakarta Tahun 2010”. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang objek yang diteliti. Data di peroleh melalui metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta, Staf Rak Sosial Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping KUBE-FM, dan juga representasi ketua Keluarga Binaan Sosial (KBS) sebagai peserta program.



Penelitian ini diukur kinerjanya berdasarkan aspek produktifitas, aspek kualitas pelayanan, aspek responsivitas, dan juga aspek profesionalisme. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program ini diantaranya tingkat sosialisasi yang kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari perspektif peserta KUBE-FM dalam mengasumsikan dana hibah. Tingkat konsolidasi dari para pendamping KUBE- FM yang kurang maksimal, dan juga kurang maksimalnya dukungan dari pihak luar pada tiap-tiap kelompok KUBE-FM yang telah terbentuk. Oleh karena itu rekomendasi yang penulis berikan untuk masalah tersebut adalah perlunya penajaman proses sosialisasi kepada peserta mengenai program KUBE-FM, perlunya upaya konsolidasi di antara para pendamping KUBE-FM, dan perlunya diadakan pelatihan kepada para peserta KUBE-FM sebagai dukungan dari pihak Dinas Sosial. Evaluasi secara menyeluruh dapat memperlihatkan hasilnya secara totalitas jika program ini telah berjalan dua tahun. Sehingga kekurangan yang muncul dalam proses pelaksanaan program KUBE-FM di Kecamatan Tegal Rejo Kota Yogyakarta Tahun 2010 bisa dimaklumi.

Penelitian selanjutnya dari Abrian Rahutomo (2011) tentang “Kinerja Panti Sosial Bina Remaja dalam Program Anak Putus Sekolah Tahun 2010-2011”. Studi kasusnya di Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini yang dilatar belakangi karena masih banyaknya anak yang putus sekolah terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Program Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Anak Putus Sekolah

Tahun 2010-2011 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja program Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Anak Putus Sekolah Tahun 2010-2011.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan sehingga dapat diperoleh gambaran lengkap tentang objek yang akan diteliti. Data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan Kepala Panti Sosial Bina Remaja, Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sosial Fungsional, Sub Bag Tata Usaha Panti Sosial Bina Remaja.

Dalam mengukur kinerja, menggunakan Aspek Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Akuntabilitas, Efektifitas, dan Efisiensi. Hasil dari penelitian ini masih kurangnya alat dan bahan yang dibutuhkan anak yang berada di Panti Sosial Bina Remaja dalam program anak putus sekolah, dan untuk jumlah dana bagi anak yang putus sekolah tersebut jangan sampai kekurangan. Kemudian program keterampilan juga sebaiknya ditambah lagi dengan keterampilan teknisi handphone, teknisi laptop dan keterampilan desain grafis. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan pada awal Bulan Februari saja tetapi dilakukan pada setiap saat. Daya tampung untuk anak asuh diharapkan untuk ditambah agar jumlah anak asuh dapat lebih banyak menimba ilmu di Panti Sosial Bina Remaja.

Penelitian dari Sahril Abdullah Yusuf (2014) “Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Terkait Implementasi Program Pembinaan Lansia Potensial Tahun 2010-2011”. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki fungsi untuk mengatasi masalah-masalah dalam bidang kesejahteraan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas pokok yang harus mereka selesaikan. Salah satunya melaksanakan pembinaan dan pembimbingan di bidang kesejahteraan sosial. Pembinaan dan pembimbingan dibidang kesejahteraan sosial ini mempunyai sasaran beberapa elemen masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial diantaranya adalah lansia. Melihat hal itu penelitian ini berfokus mengetahui bagaimana syarat untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bagaimana strategi-strategi yang dimiliki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan lansia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung oleh wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian menunjukkan tidak jauh berbedanya pembinaan yang dilakukan di luar panti atau di dalam panti yang menjadi perbedaan adalah kelengkapan kegiatan serta fasilitas yang dimiliki di dalam panti. Untuk kegiatan di dalam panti memiliki jadwal yang teratur untuk melakukan kegiatan apa dalam setiap harinya, sedangkan di luar panti mereka yang termasuk dalam lansia terlantar mendapat bantuan dana sebesar Tiga Ratus Ribuan Rupiah setiap bulan serta tergabung dalam kelompok lansia yang ada di wilayah masing-masing.

Kegiatan kelompok ini tergantung minat dari anggota kelompok, ada yang melakukan kegiatan posyandu lansia, kesenian, kerajinan, keagamaan dan lain-lain. Kemudian perlu diadakan peningkatan jumlah daya tampung panti serta pendampingan penuh terhadap kelompok-kelompok lansia masyarakat. Selain itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta perlu meningkatkan kualitas kesehatan dan pembinaan yang dibutuhkan lansia agar para lansia ini dapat berdayaguna lebih lama dan mereka memiliki kebermaknaan hidup.

Penelitian selanjutnya dari Nitha Chitrasari (2012) tentang “Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Cilegon Tahun 2011” yang mengambil lokasi di Kota Cilegon. Di mana gelandangan dan pengemis merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di Kota Cilegon, karena mereka sering dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim seperti di depan pusat perbelanjaan (*mall*), jembatan penyebrangan bahkan di setiap emperan toko. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah yang berkewajiban untuk menangani permasalahan sosial yang ada di Kota Cilegon seperti gelandangan dan pengemis.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon, Satpol PP Kota Cilegon, LSM LKBHFPP, Tokoh Masyarakat Kota Cilegon, serta gelandangan dan pengemis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terkendala oleh belum tersedianya panti rehabilitasi serta sarana dan prasarana untuk menangani mereka supaya menjadi masyarakat yang mandiri, untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial perlu membangun panti rehabilitasi agar program-program yang dibuat bisa menjadi lebih efektif sehingga dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu tentang Kinerja Dinas**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Temuan Masalah</b>
1.	Ami Prihandara	Kinerja Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di kota Serang Tahun 2012	Metode deskriptif kuantitatif	Masih kurangnya tempat yang strategis untuk anak jalanan agar dapat mengaplikasikan ilmu setelah pembinaan dan yang cukup untuk pelatihan sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.
2.	Khaerul Sonni	Kinerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kecamatan Tegal Rejo Kota Yogyakarta Tahun 2010	Metode deskriptif kualitatif	Tingkat sosialisasi yang kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari perspektif peserta KUBE-FM dalam mengasumsi, dan juga kurang intensnya dukungan dari pihak luar pada tiap tiap kelompok KUBE-FM yang telah terbentuk.

3	Abrian Rahutomo	Kinerja Panti Sosial Bina Remaja Dalam Program Anak Putus Sekolah Tahun 2010-2011	Metode deskriptif kualitatif	Masih kurangnya dana untuk anak yang berada di Panti Sosial Bina Remaja, kurangnya program keterampilan dan kurangnya sosialisasi karena sosialisasi hanya dilakukan di awal bulan february saja.
4	Sahril Abdullah Yusuf	Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Terkait Implementasi Program Pembinaan Lansia Potensial Tahun 2010-2012	Metode deskriptif kualitatif	Masih kurangnya daya tampung panti serta pendampingan penuh terhadap kelompok-kelompok lansia masyarakat. Kurangnya tingkat kesehatan dan pembinaan yang dibutuhkan lansia.
5	Nitha Chitrasari	Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Cilegon Tahun 2012	Metode deskriptif kualitatif	Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon belum optimal dikarenakan terkendalanya oleh belum tersedianya panti rehabilitasi serta sarana dan prasarana untuk menangani mereka supaya menjadi masyarakat yang mandiri.

## E. Kerangka Dasar Teori

### 1. Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

<sup>6</sup>file:///C:/Users/windows!/Downloads/UU\_Nomor\_23\_Tahun\_2014.pdf ( Diakses 10 November 2015 )

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Jika ditinjau dari definisi diatas maka pemerintahan daerah yang di maksud di sini yaitu penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas desentralisasi serta unsur peyelenggaraan pemerintah daerah merupakan Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan definisi diatas maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dikatakan sebagai lembaga yang ikut serta dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dan berwenang untuk menertibkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugasnya sebagai bagian dari pemerintah, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2) adalah sebagai berikut :  
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945”. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran-peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, seperti yang diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi daerah). Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membantu dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

## **2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>7</sup> Adapun Visi dan Misi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

Visi :

“Terwujudnya kesejahteraan sosial menuju kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia seutuhnya dan penanganan ketenagakerjaan serta ketransmigrasian yang mandiri dan berkelanjutan”.

---

<sup>7</sup>[http://www.cianjurkab.go.id/Daftar\\_Dinas\\_Nomor\\_18.html](http://www.cianjurkab.go.id/Daftar_Dinas_Nomor_18.html) ( Diakses, 9 November 2015)



### Misi :

Untuk melakukan visi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan profesionalisme SDM internal dan Optimalisasi ketatausahaan.
2. Mewujudkan Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3. Mewujudkan pelayanan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta perluasan penempatan kerja
4. Mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan.

Kemudian tugas pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :<sup>8</sup>

1. Merumuskan dan merencanakan kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pembinaan dalam bidang kesejahteraan sosial;
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional, kesejahteraan sosial
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kesejahteraan sosial;

---

<sup>8</sup>*Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kota Yogyakarta Tahun 2011.* Yogyakarta: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2011.

5. Melaksanakan ketatausahaan dinas.

### **3. Penertiban**

Penertiban berasal dari kata tertib yang berasal dari kata tertib dan berarti teratur atau mengatur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang berarti mengatur, merapikan untuk menjadikan sesuatu untuk tertib. Di mana adanya proses perbuatan atau cara berusaha untuk menjadikan tertib.<sup>9</sup>

### **4. Anak jalanan**

#### **4.1. Pengertian Anak Jalanan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat – tempat umum kriteria yang dimiliki adalah anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun, melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan, seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dan lain-lain, kegiatannya dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyusun Kamu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa cetakan 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 940

<sup>10</sup><http://library.binus.ac.id/eColls/eThesiscoll/Bab2/2007-3-00071-DS%20Bab%202.pdf> (Diakses 13 oktober 2015)

Sedangkan Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 tentang anak jalanan, anak jalanan adalah anak yang hidup di jalan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, anak jalanan adalah seorang anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
2. Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
3. Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
4. Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berusia 18 tahun kebawah, anak yang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan, anak yang bekerja di jalanan atau anak yang mencari penghasilan di jalanan atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Anak

jalanan itu membahayakan dirinya sendiri saat berada di jalanan, karena di jalanan banyak kendaraan umum dan anak jalanan mengganggu ketertiban umum saat mereka berada di jalanan.

Adapun faktor lainnya yang membuat anak berada di jalanan adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab anak memilih untuk hidup di jalanan dibandingkan tinggal bersama keluarga antara lain yaitu ketidakharmonisan keluarga seperti perceraian, percekocokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak baik itu di karenakan orang tuanya meninggal dunia maupun mereka yang tidak menjalankan fungsinya. Selain itu kekerasan fisik atau emosional yang dilakukan orang tua juga dapat menjadi salah satu pemicu anak untuk meninggalkan rumah dan turun ke jalanan. Faktor ekonomi keluarga juga dapat memaksa setiap anggota keluarga untuk tetap bertahan hidup dengan cara bergabung atau bahkan menjerumuskan diri untuk hidup dijalanan.<sup>11</sup>

## **5. Kinerja**

### **a. Pengertian Kinerja**

Pengetahuan lebih lanjut mengenai teori-teori terkait dari latar belakang masalah penelitian sangat penting karena nantinya akan lebih memahami masalah yang akan diteliti dan tidak akan menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun dasar-dasar teori yang terkait dengan penelitian yaitu :

---

<sup>11</sup> Ibid

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok.<sup>12</sup>

Menurut Purwodarminto, Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan padanya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Armstrong dan Baron. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi kepada ekonomi.<sup>14</sup>

Sementara Prawiro Sentono juga berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika.<sup>15</sup>

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting pada suatu organisasi. Dimana kinerja seseorang pada suatu organisasi sangat menentukan keberhasilan dari organisasi tersebut. Oleh

---

<sup>12</sup>Dyah mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 77

<sup>13</sup>Eriek Prayogie, *Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Mengembangkan Desa Wisata* 2013

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup> Ibid

karena itu, setiap Lembaga, Instansi baik itu Pemerintah maupun non Pemerintah sangat membutuhkan kinerja dari suatu organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Dalam bahasa Inggris pada kata "*to performance*" yang mempunyai beberapa istilah "*entries*" sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Melakukan, Menjalankan, Melaksanakan.
2. Memenuhi atau menjalankan kewajiban dalam suatu permainan.
3. Menggambarkan dengan sarana atau alat music.
4. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab.
5. Melakukan sesuatu yang di harapkan oleh seorang atau mesin.
6. Memainkan (pertunjukan musik).

Dari beberapa definisi diatas kinerja dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan dan nantinya akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pelayanan publik dimana itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari program yang telah dibuat dari sebuah organisasi. Masing-masing individu atau pun kelompok dalam sebuah organisasi diberikan tanggung jawab, hal ini diberikan kepada individu atau kelompok untuk tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika.

Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi publik sebaiknya mengadakan pembagian kerja dalam bentuk perincian tugas dari setiap karyawannya. Di dalam melaksanakan tugas,

---

<sup>16</sup> Ibid

setiap karyawan tentunya wajib menyelesaikan dan menghasilkan kerja sesuai dengan yang ditentukan. Jika setiap karyawan mencapai tujuan suatu organisasi publik tersebut akan tercapai karena kinerja suatu organisasi publik dapat dicapai berdasarkan prestasi kerja dari masing masing individu yang ada di dalamnya. Bila setiap individu menyumbang prestasi yang minimal, maka kinerja suatu organisasi publik menjadi rendah.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Menurut Dwiyanto, ada lima indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu :<sup>17</sup>

##### 1. Produktivitas

Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Pelayanan ini dimaksudkan dalam melaksanakan program dan untuk melaksanakan program tersebut di perlukan sebuah anggaran. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktifitas selanjutnya mengalami pengembangan yang lebih luas lagi dengan berorientasi pada rasio. Konsep baru ini dikembangkan General Accounting Office (GAO).

##### 2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualiat pelayanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.

---

<sup>17</sup>Ibid, Hal.78

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

### 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

### 4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit dan sarana dan prasarana yang mendukung.

### 5. Akutabilitas

Akutabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Whittaker, Menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang



digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi atau serta meningkatkan kualitas pengambilan dan keputusan akuntabilitas.<sup>18</sup> Kinerja atau prestasi yang didapatkan oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

#### 1. Aspek Responsivitas

Aspek responsivitas adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program layanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam merespon permasalahan-permasalahan serta kebutuhan dan keinginan yang disampaikan melalui aspirasi masyarakat.

#### 2. Aspek Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi

---

<sup>18</sup>Rovi Hamsyah. Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Program Kali Bersih 2011

yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit.

### 3. Aspek Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

### 4. Aspek Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas selanjutnya mengalami pengembangan yang lebih luas lagi dengan berorientasi pada rasio. Konsep baru ini dikembangkan General Accounting Office (GAO).

### 5. Aspek Profesionalisme

Aspek Profesionalisme menunjukkan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis. Profesionalisme menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola organisasi karena semakin tumbuhnya kompleksitas masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kinerja dan prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari berapa aspek sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Aspek Produktivitas (*Productivity*)

Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Aspek Kualitas Pelayanan (*quality of service*)

Aspek ini dapat dilihat sebagai aspek efektifitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada para konsumennya.

3. Aspek Responsivitas (*responsiveness*)

Yang di maksud dengan responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas

---

<sup>19</sup> Ratminto dan Atik Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 179

ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan , keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.

#### 4. Aspek Responsibilitas (*responsibility*)

Aspek ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

#### 5. Aspek Profesionalisme (*professionalism*)

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional . Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada hasil dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi. Aspek Profesionalisme, meliputi :

- a. Komitmen dan konsistensi (terhadap visi dan misi dan tujuan organisasi).
- b. Wewenang dan tanggung jawab.
- c. Integritas dan profesional.
- d. Disiplin dan keteraturan kerja.
- e. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### 6. Aspek Akuntabilitas (*accountability*)

Aspek ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

#### 7. Aspek Keterbukaan / transparansi

Yang dimaksud dengan keterbukaan atau transparansi adalah bahwa prosedur / tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah di ketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

### **F. Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan (over laping) dalam memahami konsep yang nantinya akan dikemukakan. Definisi konseptual pada penelitian ini antara lain:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan urusan pelaksana otonom daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>21</sup>
3. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Untuk mengukur kinerja perlu di gunakan aspek-aspek pengukuran kinerja yaitu, yang pertama ada aspek produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.<sup>22</sup>
4. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat – tempat umum kriteria yang dimiliki adalah anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun, melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan, seperti pedagang asongan, pengamen, ojek

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dan lain-lain, kegiatannya dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksana yang menjelaskan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga penelitian ini lebih jelas dan terarah. Adapun indikator-indikator penelitian ini tentang Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penertiban Anak Jalanan Tahun 2014, antara lain:

Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berorientasi pada hasil yang bermanfaat untuk kesejahteraan anak jalanan. Adapun hasilnya dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

### 1. Aspek Produktifitas

- a. Program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk Anak Jalanan.
- b. Anggaran di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

### 2. Aspek Kualitas Pelayanan

- a. Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penertiban Anak Jalanan.

- b. Kreatifitas dan keterampilan pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menjamin pelayanan yang baik bagi Anak Jalanan.
3. Aspek Responsivitas
- a. Kemampuan pegawai dalam melayani dan memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai anak jalanan.
  - b. Tanggapan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menanggapi kritikan dari masyarakat.
4. Aspek Responsibilitas
- a. Pencapaian program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk anak jalanan.
5. Aspek Akuntabilitas
- a. Komunikasi antar pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
  - b. Kedisiplinan Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Dengan demikian, laporan



penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>23</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Alasannya karena instansi-instansi tersebut sebagai pelaksana program penanganan masalah anak jalanan.

## **3. Unit Analisa**

Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bias juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Instansi Terkait lainnya. Dimana mewawancari 3 orang dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu, Bapak Okto selaku

---

<sup>23</sup>Prof DR.Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), PT Remaja Rosdakarya Offset, bandung, 2012. Hal 11

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan, Ibu Nanik selaku Kepala Seksi di Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dan yang terakhir dengan Bapak Yosep Widyatmoko selaku Pendamping Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>24</sup> Dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :

1. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.
2. Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.<sup>25</sup> Meliputi pimpinan dan staf bagian sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.hal 107.

<sup>25</sup>*Ibid* hal. 133

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>26</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.
2. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumen – dokumen yang bias dijadikan sebagai alat untuk melengkapi penelitian ini.

---

<sup>26</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 10.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan responden, menggunakan panduan wawancara. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan anak jalanan, sebab-sebab mereka mereka berada dijalanan, serta keadaan keluarganya. Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pendamping Pemberdayaan masyarakat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen diperoleh dari buku-buku literatur tentang masalah sosial Anak jalanan, peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan

## 6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>27</sup>

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas, penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan data yang terkumpul lainnya.

---

<sup>27</sup>Moleong, Ibid. Hal :6